

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Rozmita Dewi Yuniarti dan Elsa Tiara (2015), meneliti Pengaruh Pengalaman dan Profesionalisme Akuntan Forensik terhadap Kualitas Bukti Audit guna Mengungkap Fraud. Metode penelitian yang digunakan metode asosiatif. Teknik analisis datanya menggunakan analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman akuntan forensik dan profesionalisme akuntan forensik berpengaruh positif terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap fraud.

Anggriawan (2014), meneliti Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional dan Tekanan Waktu terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Fraud. Model analisis yang digunakan yaitu analisis regresi Linier sederhana dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*.
2. Skeptisme Profesional berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*.
3. Tekanan Waktu berpengaruh negatif terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*.
4. Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional dan Tekanan Waktu secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*.

Nyoman Adnyani, *et al.*, (2014), meneliti tentang Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor, Independensi dan Pengalaman Auditor terhadap Tanggungjawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Metode analisis data yang digunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Analisis data diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS V19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Skpetisme Profesional berpengaruh signifikan terhadap tanggungjawab auditor,
2. Independensi berpengaruh signifikan terhadap tanggungjawab auditor,
3. Pengalaman Auditor berpengaruh signifikan terhadap tanggungjawab auditor,
4. Skpetisme Profesional, Independensi, Pengalaman Auditor berpengaruh secara simultan terhadap tanggungjawab auditor.

Arsendy Muhammad Teguh (2017), meneliti Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisme Profesional, *Red Flags*, dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Teknik pengambilan sampel yaitu *convenience sampling*. Metode analisis data yang digunakan statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, Pengujian hipotesis. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji regresi berganda, pengalaman audit, skpetisme profesional, *red flags* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan untuk variabel tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Catrine Inge (2016), meneliti Pengaruh Independensi dan Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud). Metode kuantitatif deskriptif dengan model analisis regresi berganda dan uji analisis data yaitu, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan software SPSS 21. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independensi dan skpetisme profesional auditor berpengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa skpetisme profesional auditor merupakan variabel yang paling dominan.

Floreta Wiguna (2015), meneliti tentang

*“Influence Of Professional Skpeticism and Independence Of The Auditor on Fraud Detection”*

Artinya: “Pengaruh Skeptisme Profesional dan Independensi Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan”. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengambilan

sampel dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel non probabilitas (*probability sampling*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel skeptisme profesional dan independensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Secara parsial, variabel skeptisme profesional dan independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

Sarina Butar dan Halim Dedy (2017), meneliti Penerapan Skeptisme Profesional Auditor Internal Pemerintah dalam Mendeteksi Kecurangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengacu pada proposisi teori. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Responden wawancara dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu auditor investigatif yang pernah menerima gugatan terkait hasil audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor investigatif Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menerapkan skeptisme profesional dalam mendeteksi kecurangan.

Dimitrova dan Sorova (2014), membahas tentang

*“The Role Of Professional Skepticism in Financial Statement Audit and its Appropriate Application”*

Artinya: “Peran Audit Kebijakan Keuangan Skeptisisme Profesional dan Aplikasi yang Tepat”. Auditor mematuhi standar profesional dan persyaratan hukum dan peraturan saat melakukan audit laporan keuangan. Standar-standar tersebut mengharuskan skeptisisme profesional yang sesuai diterapkan dalam pelaksanaan penilaian profesional. Pelebaran dan diversifikasi bisnis di zaman modern ini, terus meningkatkan kompleksitas transaksi bisnis dan standar akuntansi. Mengingat peningkatan kompleksitas dan subjektivitas bersama dengan penekanan yang berkelanjutan pada pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, telah mengaitkan minat dalam penerapan skeptisisme profesional tingkat tinggi oleh auditor. Sementara tanggung jawab untuk skeptisisme profesional yang tepat bukanlah satu-satunya domain auditor laporan keuangan, penelitian ini berfokus pada skeptisisme profesional yang diterapkan oleh auditor dalam pelaksanaan audit laporan keuangan.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Audit

Auditing yaitu sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2016:10).

Menurut Agoes (2012:6) audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh management, beserta catatan - catatan pembukuan dan bukti - bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Arens, et al (2015:2 dan 3), auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, dan auditor independen adalah auditor yang mengeluarkan laporan mengenai laporan keuangan perusahaan.

Sedangkan definisi auditing menurut *Auditing Practices Committe (APC)* dalam Halim (2015:3) sebagai berikut :

*“An audit independent examination of, and expression of opinion on, the financial statements of an enterprise by an appointed auditor in pursuance of that appointment and in compliance with any relevant statutory obligation”.*

Artinya auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bebas tanpa dipengaruhi oleh pihak lain (independen) yang menghasilkan suatu pernyataan tentang pendapat (opini) atas laporan keuangan suatu perusahaan yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk pengangkatannya itu telah sesuai dengan ketentuan dan kewajiban hukum yang berlaku.

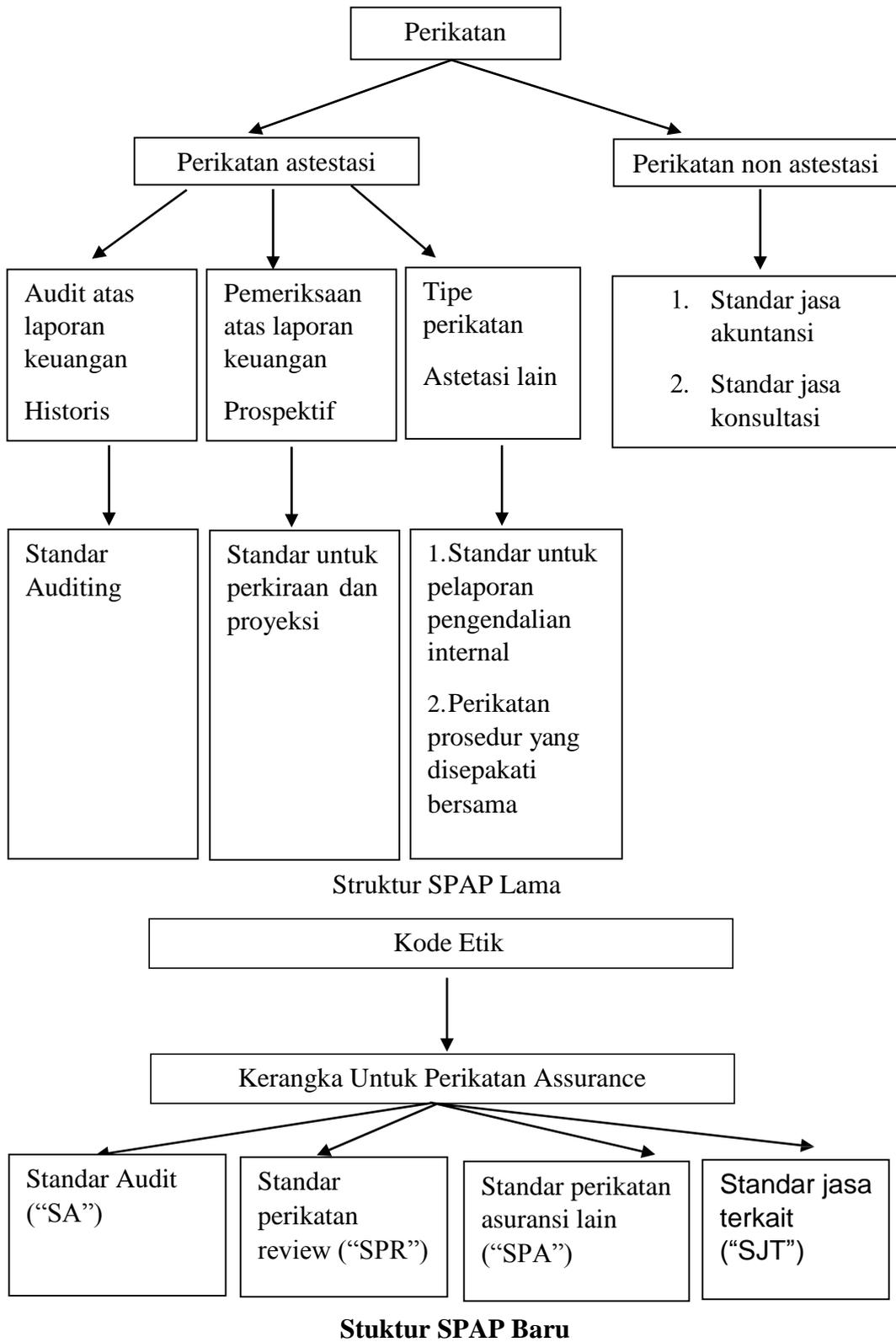
Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli dibidang auditing, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis yang dilakukan oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh management, beserta catatan - catatan pembukuan dan bukti - bukti pendukung, sehingga memperoleh (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen, serta mengkomunikasikan hasilnya tentang pendapatnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### **2.2.2 Standar Audit**

Standar audit merupakan hal yang krusial dalam mewujudkan audit yang berkualitas unggul. Arens (2010) menyatakan bahwa standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggungjawab profesionalnya. Standar auditing dibuat berdasarkan konsep dasar. Konsep dasar sangat diperlukan karena merupakan dasar pembuatan standar yang berguna untuk memberikan pengarah dan pengukuran kualitas dari mana prosedur audit dapat diturunkan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia, SPAP merupakan hasil pengembangan berkelanjutan standar profesional akuntan publik yang dimulai sejak tahun 1973. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). (Ramadhany, 2015).

Standar Profesional merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan Publik di Indonesia. Adopsi ISA mengakibatkan adanya perubahan struktur dan standar pada SPAP yang berlaku saat ini. SPAP terdahulu terdiri dari lima tipe yaitu Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntan dan *Review*, Standar Jasa Konsultasi dan Standar Pengendalian Mutu.

Gambar 2. 1 Penjelasan perbedaan struktur SPAP lama dengan yang baru



Perbedaan Stuktur SPAP lama dengan Struktur SPAP Baru (IAPI, 2016)

1. SPAP 2011 didasarkan US *Professional Standards* tahun 1998 dan tidak *diupdate* secara kontinyu dengan perubahan di US *Professional Standards* masih banyak terdapat *gaps*.
2. SPAP 2013 didasarkan pada *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncement* tahun 2010.
  - a. Menekankan terhadap aspek penilaian risiko (auditing berbasis risiko)
  - b. Standar berbasis prinsip (*principles-based standard*)
  - c. Menekankan penggunaan pertimbangan profesional (*professional judgment*) dan skeptisisme profesional :
    - a. Mengurangi pendekatan model matematis
    - b. Perlunya keterlibatan auditor yang berpengalaman, memiliki pendidikan dan pelatihan memadai, dan ciri kepribadian tertentu (seperti sikap skeptisisme profesional)
  - d. Penerimaan klien (*client acceptance*) dalam SPAP baru lebih jelas dengan adanya syarat “Prakondisi”. SA memerlukan pemahaman memadai tentang kerangka pelaporan keuangan apa yang digunakan entitas. Berbeda kerangka dapat berakibat pada penggunaan SA yang berbeda
  - e. *Risk Based* yang sifatnya “*top down approach*”, pada SPAP lama *Risk Based* namun sifatnya “*cyclical*”. SPAP baru sangat memperhatikan atau concern pada kecurangan (fraud) dan kepatuhan terhadap regulasi (*compliance to regulation*)
  - f. Materialitas menggunakan konsep “*buffer*”, selisih antara Materialitas dengan Materialitas pelaksanaan
  - g. Respon terhadap risiko (*risk response*) yang lebih sistematis dan lugas pada prosedur yang memungkinkan memperoleh bukti yang cukup dan tepat
  - h. Grup audit, auditor tidak boleh melakukan *splitting responsibility*

Standar auditing ISA mulai diterapkan pada tahun 2013 untuk emiten dan tahun 2014 untuk *non*-emiten. Standar Auditing tersebut wajib diterapkan oleh akuntan publik dalam proses audit laporan keuangan historis entitas pada semua ukuran dan kompleksitas. Tercapainya konvergensi terhadap standar pelaporan internasional akan memudahkan penerapan standar audit secara konsisten yang akan mengarah pada comparability laporan keuangan.

Struktur Standar Auditing berbasis ISA terdiri dari pendahuluan, tujuan, definisi dan ketentuan. Auditor harus mematuhi seluruh standar auditing yang relevan dengan audit. ISA mewajibkan auditor untuk memiliki pemahaman tentang keseluruhan isi suatu standar auditing, termasuk materi dan penjelasan lain. Auditor tidak dapat menyatakan kepatuhannya terhadap standar auditing pada laporan auditor ketika auditor tidak memenuhi ketentuan SPAP dan SA lain yang relevan.

Tabel 2. 1 Daftar International Standards on Auditing

<b>ISA/ ISQC 1 Referensi</b>	<b>Standar</b>
<b>ISQC 1</b>	<b>Pengendalian mutu untuk perusahaan yang melakukan audit dan review laporan keuangan, dan jaminan lainnya dan jasa terkait</b>
<b>ISA 200-299</b>	<b>Prinsip-prinsip umum dan tanggung jawab</b>
200	Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit
210	Persetujuan atas ketentuan perikatan audit
220	Pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan
230	Dokumentasi audit
240	Tanggungjawab auditor terkait dengan kecurangan dalam audit laporan Keuangan
250	Pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit laporan

	Keuangan
260	Komunikasi dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola
265	Pengkomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dan manajemen
<b>ISA 300-450</b>	<b>Penilaian risiko dan respons terhadap risiko yang telah dinilai</b>
300	Perencanaan suatu audit atas laporan keuangan
315	Pengidentifikasian dan penilaian kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya
320	Materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit
330	Repons auditor terhadap risiko yang telah dinilai
<b>ISA/ ISQC 1 Referensi</b>	<b>Standar</b>
450	Pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit
<b>ISA 500-580</b>	<b>Bukti audit</b>
500	Bukti audit
501	Bukti audit - pertimbangan spesifikasi atas unsur pilihan
505	Konfirmasi eksternal
510	Perikatan audit tahun pertama - saldo awal
520	Prosedur analitis
530	Sampling audit
540	Audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkutan
550	Pihak berelasi
560	Peristiwa kemudian

570	Kelangsungan usaha
580	Representasi tertulis
<b>ISA 600-620</b>	<b>Penggunaan pekerjaan pihak lain</b>
600	Pertimbangan khusus - audit atas laporan keuangan grup (termasuk pekerjaan auditor komponen)
610	penggunaan pekerjaan auditor internal
620	penggunaan pekerjaan seorang pakar auditor
<b>ISA/ ISQC 1 Referensi</b>	<b>Standar</b>
ISA 700-720	Kesimpulan audit pelaporan
700	Perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan
706	Paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor Independen
<b>ISA/ ISQC 1 Referensi</b>	<b>Standar (lanjutan)</b>
720	Tanggungjawab auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan
<b>ISA 800-810</b>	<b>Area-area khusus</b>
800	Pertimbangan khusus -audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus
805	Pertimbangan khusus - audit atas laporan keuangan tunggal dan unsur, akun atau pos spesifikasi dalam suatu laporan keuangan

810	Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan
-----	--

Sumber : Audit berbasis ISA, Tuanakotta (2013) & IAPI

### 2.2.3 Unsur-unsur Penting Audit

Menurut Tandiontong (2016:65-67) menjelaskan bahwa audit memiliki 7 unsur-unsur penting yaitu :

1) Suatu proses sistematis

Audit akuntan merupakan suatu proses sistematis, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Audit akuntan dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.

2) Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

Proses sistematis tersebut diajukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

3) Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi

Yang dimaksud dengan pernyataan mengenai kegiatan ekonomi disini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang umumnya terdiri dari empat laporan keuangan pokok yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan laba yang ditahan, dan laporan perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan dapat pula berupa laporan biaya pertanggungjawaban tertentu dalam perusahaan.

4) Menetapkan tingkat kesesuaian

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan dekat tidaknya pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian

antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula dapat bersifat kualitatif.

#### 5) Kriteria yang telah ditetapkan

Patokan atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif, anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen, prinsip akuntansi yang lazim (general accepted accounting principles).

Umumnya akuntan yang bekerja di inspeksi pajak, di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakan kriteria undang-undang yang merupakan produk badan legislatif atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan audit terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akuntan yang bekerja sebagai akuntan intern di suatu perusahaan menggunakan kriteria anggaran atau tolak ukur prestasi yang lain dalam melaksanakan auditnya. Akuntan publik menggunakan kriteria prinsip akuntansi yang lazim dalam menilai laporan keuangan yang diperiksanya. Di Indonesia prinsip akuntansi yang lazim ini disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

#### 6) Penyampaian hasil

Penyampaian hasil audit akuntan sering disebut dengan pengesahan (attestation). Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit akuntan (audit report). Pengesahan dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat keuangan atas pernyataan dibuat oleh pihak yang diperiksa. Misalnya, jika akuntan publik menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksanya adalah wajar, maka pemakai laporan keuangan akan mempercayai informasi yang tercantum dalam laporan tersebut. Sebaliknya, jika akuntan publik menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksanya tidak wajar, maka kepercayaan pemakai laporan keuangan terhadap laporan tersebut akan berkurang atau hilang.

## 7) Pemakai yang berkepentingan

Dalam dunia bisnis, pemakia yang berkepentingan terhadap laporan audit akuntan adalah : pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan inspeksi pajak.

### 2.2.4 Jenis-jenis Audit

Ada empat jenis audit diantaranya audit umum keuangan, audit operasional, audit tujuan tertentu, dan audit forensik. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis audit menurut Amrizal Sutan Kayo (2013:43-45) adalah:

1. Audit Umum Keuangan (*General Audit*) Adalah suatu reuiu independen yang terutama ditujukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan yang telah disajikan oleh manajemen. Audit ini lazimnya dilakukan oleh pemeriksa yang berasal dari luar organisasi yang bersangkutan dan dilaksanakan tidak terperinci. Audit ini harus dilakukan sesuai dengan SPAP dan auditor memberikan pendapatnya atas laporan keuangan yang telah diaudit tersebut. Laporan hasil audit keuangan memuat pendapat atau opini auditor.
2. Audit Operasional (*Management Audit*) Audit operasional atau pemeriksaan pengelolaan (*management audit*) adalah suatu pemeriksaan yang independen, sistematis, selektif dan analitis untuk menilai bagaimana cara pengelolaan atau operasi suatu organisasi diatur dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu semua peringkat manajemen dan pelaksanaan tugas yang lebih baik dengan memberikan infomasi kelemahan yang dijumpai berikut usul-usul rekomendasi perbaikannya. Audit ini ditekankan pada evaluasi terhadap penggunaan sumber daya dan dana apakah sudah dilakukan secara hemat, efisien dan efektif.
3. Audit Tujuan Tertentu (*Special Audit*) Audit kepatuhan berhubungan dengan kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan kebijakan, peraturan, atau undang-undang yang telah ditentukan sebelumnya. Audit dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Audit ini bersifat; eksaminasi, review, atau prosedur yang telah disepakati lebih dahulu.
4. Audit Forensik (*Forensic Audit*) Kadangkala audit forensik disebut juga akuntansi forensik. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat

dipertahankan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau administratif. Menurut Hopwood (2009), “akuntansi forensik adalah penerapan keahlian investigasi dan analisis untuk tujuan memecahkan berbagai masalah financial sesuai dengan ketentuan lembaga pengadilan”. Sementara itu *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mendefinisikan *forensic accounting* tersebut lebih banyak menggunakan ilmu auditing yang secara spesifik dan bertujuan untuk litigasi.

Sedangkan menurut Mulyadi (2014 : 30-32) auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Dalam audit laporan keuangan, auditor independen menilai kewajaran atas laporan keuangan klien dengan dasar kesesuaiannya atas prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit telah sesuai dengan peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan dapat ditemukan dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Suatu proses yang sistematis untuk menilai efektivitas organisasi, efisiensi dan ekonomi operasi di bawah pengendalian manajemen dan hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit operasional tersebut. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga.

### 2.2.5 Opini Audit

Dalam *Internasional Standards on Auditing* menjelaskan terdapat 2 situasi dalam menerumuskan pemberian opini oleh auditor yaitu :

## 1) Opini standard

Menurut ISA 700.35 dan 700.36 dalam Tuanakotta (2015:501). Ketika memberikan pendapat yang tidak dimodifikasi atas laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka penyajian wajar, pendapat auditor harus, kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan perundang-undangan, menggunakan frasa, yang dipandang ekuivalen dengan: a) laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan [kerangka pelaporan keuangan yang berlaku]; b) laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai dengan [kerangka pelaporan keuangan yang berlaku]. Atau ketika laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka kepatuhan, pendapat auditor harus menyatakan laporan keuangan dibuat, dalam semua hal yang material, sesuai dengan [kerangka pelaporan keuangan yang berlaku].

## 2) Modifikasi Opini

Menjelaskan penyebab terjadi modifikasi menurut ISA 705.16 dalam Tuanakotta (2015:505). Ketika auditor memodifikasi pendapat atas laporan keuangan, ia wajib, di samping unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhinya sesuai ISA 700, memasukkam alinea dalam laporannya yang menjelaskan masalah yang menyebabkan modifikasi. [istilah yang digunakan dalam alinea selanjutnya ialah alinea modifikasi]. Auditor wajib menempatkan alinea ini langsung sebelum alinea pendapat dalam laporan auditor dan menggunakan judul “Alasan untuk Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, “Alasan untuk Tidak Wajar (TW)”, atau “Alasan untuk Tidak Memberikan Pendapat (TMP)”, sesuai kasusnya.

Terdapat 3 jenis modifikasi opini, yakni pendapat dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*).

A. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) adalah suatu laporan yang diterbitkan apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar tetapi ada pembatasan lingkup audit (Islahuzzaman, 2012:314). Auditor wajib memberikan opini wajar dengan pengencualian jika: a) auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup

dan tepat, menyimpulkan bahwa salah saji, sendiri-sendiri atau digabungkan, adalah material, tetapi tidak pervasif, untuk laporan keuangan yang bersangkutan; b) auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberian pendapat, tetapi ia menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang ditemukan mungkin material tetapi tidak pervasif (ISA 705.7 dalam Tuanakotta, 2015:549).

B. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) adalah suatu laporan yang diterbitkan apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan PSAK (Islahuzzaman, 2012:314). Auditor wajib memberikan opini tidak wajar jika ia, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa salah saji, sendiri-sendiri atau digabungkan, adalah material dan pervasif untuk laporan keuangan yang bersangkutan (ISA 705.8 dalam Tuanakotta, 2015:549).

C. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Auditor wajib memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat jika ia tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberian pendapat, dan ia menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang tidak ditemukan bisa material dan pervasif, atau auditor wajib memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat jika, dalam situasi yang sangat langka di mana ada beberapa ketidakpastian, ia menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masing-masing ketidakpastian tersebut, tidak mungkin baginya memberikan pendapat karena ketidakpastian tersebut bisa saling terkait dan dampak kumulatif dari ketidakpastian itu terhadap laporan keuangan (ISA 705.9 dan 705.10 dalam Tuanakotta, 2015:549).

## **2.2.6 Pengalaman Audit**

### **2.2.6.1 Pengertian Pengalaman Audit**

Bagi auditor, pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki karena pengalaman audit mempengaruhi ketepatan penilaian auditor

terhadap bahan bukti yang dibutuhkan. Pengalaman dalam bekerja merupakan suatu proses pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung akan menambah keahlian auditor dalam menjalankan tugasnya yang mampu mengindikasikan risiko-risiko dalam suatu entitas yang didapat dari pengalaman dalam berbagai industri tempat klien audit berkecimpung.

Kusumastuti (2008:56) dalam Aulia (2012) menyatakan bahwa pengalaman adalah keseluruhan perjalanan yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Pengalaman berdasarkan lama bekerja merupakan pengalaman auditor dihitung berdasarkan suatu waktu atau tahun. Sehingga auditor yang telah lama bekerja, maka akan dapat menambah dan memperluas pengetahuan auditor dibidang akuntansi dan dibidang auditing.

Pengalaman menumbuhkan kemampuan auditor untuk mengolah informasi dan menentukan solusi untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Serta, pengalaman auditor juga mempengaruhi kemampuan kerja, semakin sering auditor bekerja dan melakukan pekerjaan yang sama, maka akan menjadi makin terampil auditor tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan yang lebih banyak dibanding dengan auditor yang berpengalaman. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya akan semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja (Nirmala, 2013). Jika seseorang melakukan pekerjaan yang sama secara terus-menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam menyelesaikannya, dikarenakan dia telah benar-benar memahami teknik atau cara menyelesaikannya, serta telah banyak mengalami berbagai hambatan-hambatan atau kesalahan dalam pekerjaannya tersebut, sehingga dapat lebih cermat dan berhati-hati menyelesaikannya (Singgih dan Bawono, 2010)

Dari berbagai uraian pernyataan dan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang telah dialaminya. Bagi seorang auditor yang melakukan pekerjaan secara profesional pengalaman menjadi hal penting karena dengan semakin mempunyai banyak pengalaman akan mempengaruhi kemampuan kerja, yang membuat auditor makin terampil dalam menyelesaikan

pekerjaannya yang memungkinkan peningkatan kinerja, serta auditor dapat mempunyai bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan auditnya.

Bahkan agar akuntan baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dan mendapatkan gelar profesinya, pemerintah mensyaratkan berpengalaman praktik dibidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP (Peraturan Menteri Keuangan No: 17/PMK.01/2008)

Berdasarkan penjelasan diatas, pengalaman diukur dengan segi lamanya waktu bekerja, dan banyaknya penugasan yang telah dilakukan:

- 1) Pengalaman dari segi lamanya waktu bekerja di KAP berdasarkan satuan waktu/tahun. Dengan lamanya bekerja auditor dapat lebih berpengalaman dalam melakukan pekerjaannya, karena semakin berpengalaman auditor dapat meminimalkan kesalahan dalam melaksanakan pekerjaannya, dapat mempengaruhi setiap keputusan yang akan dibuat, serta dapat menyelesaikan tugas audit dengan tepat waktu.
- 2) Pengalaman dari banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Dapat menambah keahlian auditor dalam menjalankan tugasnya yang mampu mengindikasi risiko-risiko dalam suatu entitas yang didapat dari pengalaman dalam berbagai industri tempat klien audit berkecimpung. Semakin auditor mempunyai pengalaman dari banyaknya penugasan yang pernah dilakukan maka semakin meningkat kinerja dan meningkatnya kompetensi sebagai auditor,serta dapat lebih peka dan cepat tanggap dalam mendeteksi adanya kekeliruan.

#### **2.2.6.2 Faktor-Faktor Pengalaman Audit**

Dalam Standar Akuntansi dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada pengalaman yaitu :

a. Faktor Pendidikan Formal

Auditor tidak dapat memenuhi persyaratan keahlian jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman yang memadai dibidang auditing (SA Seksi 210:02).

b. Faktor Pengalaman dalam Praktik Audit

Pencapaian keahlian auditor diperluas melalui pengalaman-pengalaman dalam praktik audit. Asisten junior harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan supervisi yang memadai dan review atas pekerjaannya dari atasan yang lebih berpengalaman (SA Seksi 210:03).

c. Faktor Pelatihan Teknis

Guna memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan teknis ini harus mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (SA Seksi 210:03).

## **2.2.7 Skeptisme Profesional**

### **2.2.7.1 Pengertian Skeptisme Profesional**

Dalam Kerangka untuk Perikatan Asurans SPAP (2013:17) menjelaskan bahwa:

“Praktisi merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans dengan suatu sikap skeptisisme profesional. Suatu sikap skeptisisme profesional berarti praktisi membuat suatu penilaian kritis (*critical assessment*) dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti-bukti yang diperoleh, dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Contoh, suatu sikap skeptisisme profesional diperlukan praktisi selama proses perikatan untuk mengurangi risiko terabaikannya hal-hal yang mencurigakan, tersamaratakannya hasil observasi ketika menarik kesimpulan, serta digunakannya asumsi yang keliru dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur pengumpulan bukti dan pengevaluasian hasil yang terkait”.

Meskipun auditor percaya bahwa klien memiliki integritas, namun selalu berpikir kritis akan membantu auditor menghilangkan celah distorsi (secara alami) yang ada dibalik sikap percayanya tersebut. Sikap yang selalu mempertanyakan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan auditor untuk bersikap mempercayai klien, namun tetap berusaha untuk selalu melakukan verifikasi dengan mengevaluasi bukti pendukung atas angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan meliputi penilaian kritis atas bukti tersebut, dengan selalu mempertanyakan segala sesuatunya secara menyelidik, dan fokus terhadap kemungkinan adanya inkonsistensi. Apabila skeptisisme profesional dapat dijalankan dengan baik akan membantu auditor mengurangi kegagalan audit yang mungkin dapat timbul selama audit berlangsung.

Mempertahankan skeptisisme profesional selama audit berlangsung diperlukan untuk mengurangi risiko:

- a) Kegagalan dalam mengidentifikasikan kondisi-kondisi yang tidak lazim.
- b) Terlalu menyamaratakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil observasi audit.
- c) Menggunakan asumsi yang tidak tepat dalam menemukan sifat, saat, dan luas prosedur audit.

Skeptisme profesional (*professional skepticism*) adalah sikap perilaku (*attitude*) yang sarat pertanyaan dalam benak (*quieting mind*), waspada (*being alert*) pada keadaan-keadaan yang mengindikasikan kemungkinan salah saji karena kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) dan penilaian yang kritis (*critical assessment*) terhadap bukti. (Tuanakotta, 2013).

Menurut Eko Feri Anggriawan (2014) skeptisisme adalah sebagai berikut: “Skeptisisme adalah sikap kritis dalam menilai kehandalan asersi atau bukti yang diperoleh, sehingga dalam melakukan proses audit seorang auditor memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas suatu asersi atau bukti yang telah diperolehnya dan juga mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh”.

Alvin. A Arens (2011:462) dalam Herman Wibowo mendefinisikan skeptisisme profesional yaitu sebagai berikut : “Skeptisisme profesional adalah suatu sikap auditor yang tidak mengasumsikan manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut.”

International Federation of Accountants (IFAC) mendefinisikan professional skepticism dalam konteks evidence assessment atau penilaian atas bukti audit, menurut IFAC pengertian Skeptisisme profesional audit adalah sebagai berikut:

*“Necessary to the critical assessment of audit evidence. This includes questioning contradictory audit evidence and the reliability of documents and responses to inquiries and other information obtained from management and those charged with governanc” (ISA 2009 200:15).*

Lebih spesifik sikap skeptisisme profesional berarti bahwa auditor membuat penilaian kritis, dengan sebuah mempertanyakan pikiran, dari keabsahan bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti bahwa bertentangan atau membawa mempertanyakan keandalan dokumen dan tanggapan terhadap pertanyaan dan Informasi lainnya yang diperoleh dari manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. (Quadackers, 2009) Skeptisisme merupakan manifestasi dari obyektifitas. Skeptisisme tidak berarti bersikap sinis, terlalu banyak mengkritik, atau melakukan penghinaan.

#### **2.2.7.2 Unsur-Unsur Skeptisme Profesional**

*International Federation of Accountant (IFAC)* (Tuanakotta 2011:78) mendefinisikan unsur – unsur Skeptisme Profesional kedalam 6 macam unsur, yaitu:

1. A critical Assesment

IFAC menjelaskan skeptisme profesional adalah a critical assesment, maksudnya yaitu adanya penilaian yang kritis dan tidak menerima begitu saja untuk setiap informasi yang diberikan oleh manajemen kliennya.

2. With a questioning mind

IFAC menjelaskan cara berfikir seorang auditor yang harus terus- menerus bertanya dan mempertanyakan kelengkapan dan keakuratan informasi yang diberikan oleh manajemen klien.

3. Of the validity of audit evidence obtained  
IFAC disini menjelaskan bahwa seorang auditor harus memastikan validitas dari bukti audit yang diperoleh.
4. Alert to audit evidence that contradicts  
IFAC menjelaskan bahwa auditor diharuskan untuk waspada terhadap semua bukti yang kontradiktif/berlawanan.
5. Bring into question the reliability of document and responses to inquiries and other information  
IFAC disini menjelaskan bahwa auditor harus terus menerus mempertanyakan tentang keandalan dokumen dan peka terhadap setiap tanggapan yang diperoleh dari klien atas semua pertanyaan serta informasi lain yang didapat.
6. *Obtained from management and those charged with governance*  
IFAC menjelaskan tentang data yang diperoleh dari manajemen dan mengkoordinasikan kepada pihak yang berwenang dalam pengelolaan perusahaan.

### **2.2.7.3 Karakteristik Skeptisme Profesional**

Hurt et al., (2010) dalam Alwee (2010), menerangkan tentang karakteristik skeptisme profesional yang dibentuk oleh beberapa faktor, yaitu :

#### **Memeriksa dan Menguji Bukti (*Examination of Evidence*)**

1. Karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian bukti (*examination of evidence*) yang terdiri dari *questioning mind* (mempertanyakan), *suspension on judgement* (suspensi atas penilaian), dan yang terakhir *search for knowledge* (mencari pengetahuan).
2. Memahami Penyedia Informasi (Understanding Evidence Providers)

Karakteristik yang berhubungan dengan pemahaman terhadap karakteristik penyedia informasi (*understanding evidence providers*) yaitu *interpersonal understanding* (pemahaman interpersonal).

### 3. Mengambil Tindakan atas Bukti (Action in the Evidence)

Karakteristik yang berhubungan dengan pengambilan tindakan atas bukti yang diperoleh (*action in the evidence*) adalah *self confidence* (percaya diri) dan *self determination* (penentuan diri).

Lebih lengkap terkait karakteristik diatas :

#### a. *Questioning Mind*

Yaitu karakter skeptis seseorang yang kerap mempertanyakan suatu alasan, penyesuaian, dan bukti akan sesuatu yang dihadapinya dan diperoleh .

Karakteristik skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator :

1. Menolak suatu pernyataan atau statement tanpa adanya pembuktian yang jelas.
2. Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian suatu hal.

#### b. *Suspension on Judgement*

Merupakan karakter skeptis yang membuat seseorang membutuhkan waktu lebih lama dalam suatu kondisi tertentu untuk dapat membuat pertimbangan yang matang, dan menambahkan informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.

Karakteristik skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator :

1. Membutuhkan informasi yang lebih banyak
2. Membutuhkan waktu yang lama namun matang untuk membuat suatu keputusan.
3. Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum terungkap.

#### c. *Search for Knowledge*

Merupakan karakter skeptis yang didasari oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi. Rasa ingin tahu tersebut ditujukan semata-mata untuk menambah pengetahuan yang dapat digunakan dalam melakukan audit berdasarkan setiap pengetahuan yang diperoleh.

Karakteristik skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator :

1. Lebih banyak untuk mencari dan berusaha untuk menemukan informasi-informasi baru yang up-to-date.
2. Menjadi sesuatu yang menyenangkan bila menemukan hal-hal yang baru.
3. Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum terungkap.

*d. Interpersonal Understanding*

Merupakan karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, integritas dari penyedia informasi.

Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator :

1. Berusaha untuk memahami perilaku orang lain.
2. Berusaha memahami alasan mengapa seseorang berperilaku.

*e. Self Confidence*

Adalah karakter skeptis seseorang yang percaya akan kemampuan dirinya sendiri untuk secara profesional dapat merespon dan mengolah semua bukti yang sudah dikumpulkan (percaya akan kapasitas dan kapabilitas diri sendiri).

*f. Self Determination*

Merupakan sikap seseorang yang selalu menyimpulkan sesuatu secara objektif atas bukti yang diperoleh dan sudah dikumpulkan.

Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator :

1. Tidak langsung menerima atau membenarkan pernyataan dari orang lain.
2. Mempertimbangkan penjelasan dan tanggapan dari orang lain.
3. Menekankan pada suatu hal yang bersifat tidak konsisten (inconsistent).
4. Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain atau suatu hal.

**2.2.7.4 Faktor Yang Mempengaruhi Skeptisme Profesional**

Siegel dan Marconi (1989) dalam Noviyanti (2008) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh:

1. Faktor sosial (kepercayaan),
2. Faktor psikologikal (penaksiran risiko kecurangan), dan
3. Faktor personal (kepribadian).

### **2.2.7.5 Kewaspadaan Yang Mempengaruhi Skeptisme Profesional**

Skeptisisme profesional mensyaratkan perlunya kewaspadaan terhadap:

- a) Bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lainnya yang diperoleh.
- b) Informasi yang menimbulkan keragu-raguan atas keandalan suatu dokumen.
- c) Keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan.
- d) Kondisi yang memerlukan prosedur audit tambahan.

### **2.2.8 Kompetensi**

#### **2.2.8.1 Pengertian Kompetensi**

Menurut Tandiontong (2016:172), kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya. Pada masa lalu seseorang auditor yang kompeten adalah auditor yang menguasai teknik pembukuan saja.

Menurut Lee (1993:66) dalam Tandiontong (2016:172), berpendapat bahwa auditor saat ini diharapkan untuk memiliki kompetensi profesional yang substansial di berbagai area yang saling berkaitan yang berpengaruh terhadap tugas audit. Di antara keahlian yang harus dikuasai oleh auditor adalah akuntansi, statistika, komputasi, ekonomika, hukum, manajemen, dan kebijakan publik.

Menurut Sukrisno Agoes (2014:146) kompetensi adalah : “suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill) yang mencukupi. serta mempunyai sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya”

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati (2010:3) mendefinisikan Kompetensi sebagai berikut: “Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan pengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menemukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya”

Arens et al., (2011 : 42), mendefinisikan kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikut pendidikan profesional yang berkelanjutan. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam (Standar Profesional Akuntan Publik, 2011), menyebutkan bahwa Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.”

Mulyadi (2012) menyatakan kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual atau sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, kompetensi yang dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi.

Agusti dan Putri (2013) mengemukakan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Nirmala dan Cahyonowati (2013) menemukan bahwa auditor berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik.

Zu'amah, (2009), menyimpulkan kompetensi auditor adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium dan lain-lain seperti : (1) Ujian CPA (*Certified Public Accountant*) untuk luar negeri dan ujian SAP (Sertifikat Akuntan Publik) untuk di Indonesia, (2) PPB (Pendidikan

Profesi Berkelanjutan), (3) Pelatihan- pelatihan interndan ekstern, (4) Keikutsertaan dalam seminar, simposium dan lain-lain.

### **2.2.8.2 Karakteristik Kompetensi**

Adapun beberapa karakteristik kompetensi menurut lyle dan spencer dalam Harhianto (2012:92) terdapat lima karakteristik dari kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motives*)
2. Karakteristik (*Trains*)
3. Pengetahuan (*Knowledge*)
4. Keterampilan (*Skill*)

Berikut ini akan dibahas secara ringkas rasionalisasi (dasar pemikiran) dari motif, karakteristik, pengetahuan, dan keterampilan:

1. Motif (*Motives*)

Motif adalah hal-hal yang berfikir oleh seseorang untuk berfikir dan memiliki keinginan secara konsisten yang akan dapat menimbulkan tindakan.

2. Karakteristik (*Trains*)

Karakteristik adalah karakteristik fisik-fisik dan responsrespons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.

3. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang content tertentu.

4. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental.

Dari keempat karakteristik diatas, penulis dapat mengungkapkan pendapat tentang pandangan mengenai kompetensi auditor berkenaan dengan masalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki auditor didukung dengan pengetahuan yang bersumber dari pendidikan formal dan disiplin ilmu yang relevan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaan

### 2.2.8.3 Komponen Kompetensi

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati (2010:25) Komponen kompetensi untuk auditor terdiri atas:

1. Komponen pendidikan
2. Komponen pengetahuan
3. Komponen pelatihan

Yang dimaksud dari ketiga komponen diatas adalah :

a. **Komponen Pendidikan**

Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI 2001). Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan berkelanjutan.

b. **Komponen Pengetahuan**

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan). ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor yaitu :

1. **Pengetahuan pengauditan umum**

Pengetahuan pengauditan umum disini seperti risiko audit, prosedur audit dan lain-lain yang kebanyakan diperoleh auditor diperguruan tinggi, dan sebagiannya lagi biasanya di dapat auditor dari berbagai pelatihan – pelatihan yang di ikuti auditor dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor.

2. Pengetahuan area fungsional

Pengetahuan area fungsional yang dimaksud disini adalah pengetahuan di area fungsional seperti perpajakan serta pengauditan dengan menggunakan komputer. Pengetahuan area fungsional sebagian di dapat di pendidikan formal perguruan tinggi, dan sebagian besarnya di dapat dari pelatihan dan pengalaman.

3. Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang baru

Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang baru dapat auditor peroleh dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan.

4. Pengetahuan tentang industri khusus

Pengetahuan tentang industri khusus sama halnya dengan poin – poin sebelumnya pengetahuan tentang industri khusus biasa diperoleh melalui pelatihan – pelatihan dan pengalaman.

5. Pengetahuan tentang bisnis umum serta penyelesaian masalah Pengetahuan tentang bisnis umum serta penyelesaian masalah diperoleh melalui pelatihan – pelatihan yang auditor ikut serta dan pengalaman yang di miliki auditor.

c. Komponen Pelatihan

Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi (Noviyani 2010). Auditor baru yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukkan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih baik dibanding dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut (Carpenter.*et.al.*, 2009 dalam Yulius Jogi Christiawan 2012:68). Seorang auditor menjadi ahli terutama melalui pelatihan. Untuk meningkatkan kompetensi perlu dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan.

## **2.2.9 Etika Profesi**

### **2.2.9.1 Pengertian Etika Profesi**

Etika adalah suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang perilaku manusia. Atau dengan kata lain, cabang filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruk. Untuk menyebut etika, biasanya ditemukan banyak istilah lain moral, norma dan etiket.

Menurut Danang Sunyoto (2014:39) “Etika atau ethics merupakan peraturan-peraturan yang dirancang untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi. Secara umum, etika merupakan nilai-nilai prinsip moral”.

Menurut Alvin A. Arens, et al., dalam bukunya berjudul *Jasa Audit dan Assurance* (2013:60) mengatakan bahwa etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atas nilai-nilai.

Sedangkan menurut AL. Haryono Jusup (2014:100) mengemukakan pengertian etika sebagai berikut: “Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *ethos* yang berarti “karakter”. Nama lain dari etika yaitu moralitas yang berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *mores* yang berarti “kebiasaan”. Moralitas berfokus pada “benar” dan “salah” perilaku manusia. Jadi etika berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain”.

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa etika adalah peraturan-peraturan dan prinsip moral yang dianut oleh sekelompok atau golongan manusia masyarakat.

Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab.

Menurut Rizal Isnanto (2010:6) profesi adalah: “Profesi adalah kelompok lapangan pekerjaan yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, yang hanya dapat dicapai melalui penguasaan pengetahuan yang berhubungan dengan sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta diikat dengan suatu disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh para pelaku profesi tersebut”.

Menurut Erni R. Ermawan (2012:150): “Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berupa kegiatan pokok yang mengandalkan suatu keahlian dan keterampilan tertentu, sebagai mata pencaharian untuk menghasilkan nafkah hidup”.

Profesi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Trianto dan Titik Triwulan, T. (2010:12): “Profesi adalah suatu pekerjaan profesional yang di dalamnya menggunakan teknik serta prosedural yang bertumpu pada landasan intelektual yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian secara langsung dapat diabdikan bagi kemaslahatan orang banyak”.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada suatu kompetensi khusus, berbasis intelektual, partikal dan memiliki standar keprofesian tertentu yang membedakan dengan profesi lainnya.

Menurut Kinantia dalam Abdul Halim (2012) etika profesi auditor adalah: “Etika profesi auditor merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penugasan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai auditor”.

### **2.2.9.2 Jenis-Jenis Etika Profesi**

Menurut Keraf dan Imam (2001: 33-35) dalam Farid dan Suranta (2012:5) etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

### 1. Etika Umum

Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas pengertian umum dan teori-teori.

### 2. Etika Khusus

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Etika Individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. Etika Sosial berkaitan dengan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia dengan manusia lainnya yang salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi akuntan.

#### **2.2.9.3 Kode Etik Profesi**

##### 1. Tanggungjawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan sejalan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

##### 2. Kepentingan umum

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan

keuangan, dan pihak lainnya bertanggung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

### 3. Integritas

Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.

### 4. Objektif

Auditor menunjukkan obyektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak berpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak dalam memberikan pertimbangan.

### 5. Independensi

Merupakan terjemahan dari kata independence yang berasal dari bahasa inggris, yang mempunyai arti kebebasan, kebebasan ini bermakna tidak tergantung atau dikendalikan oleh apapun; bertindak atau berfikir sesuai dengan kehendak hati. Independensi adalah situasi atau keadaan dimana seseorang tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya, suatu keadaan dimana seseorang mandiri bebas serta tidak tergantung pada siapapun (Sihotang 2016 : 194)

### 6. Kompetensi

Auditor menetapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

### 7. Kehati-hatian profesional

Dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkapkan berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam mengevaluasi bukti, auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai (Wiratama dan Budiarta, 2015)

#### 8. Kerahasiaan

Auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi

#### 9. Standar teknis

Setiap anggota harus melakukan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh ikatan akuntan indonesia, Internasional Federation of Accountants, badan pengatur dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Kode etik profesi akuntan publik IAPI (2011: Par 100.12) menjelaskan mengenai pengamanan ancaman independensi. Pengamanan bisa ditetapkan oleh profesi, perundang-undangan, atau ketentuan lain, antara lain:

- a) Persyaratan pendidikan, pelatihan dan pengalaman untuk memasuki profesi,
- b) Persyaratan pengembangan dan pendidikan profesional berkelanjutan,
- c) Peraturan tata kelola perusahaan,
- d) Standar profesi,
- e) Prosedur pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi profesi atau regulator,
- f) Penelaah eksternal oleh pihak ketiga yang diberikan kewenangan hukum atas laporan, komunikasi dan informasi yang dihasilkan oleh Praktisi.

## **2.2.10 Pendeteksian Fraud (Kecurangan)**

### **2.2.10.1 Pengertian Pendeteksian Fraud (Kecurangan)**

Institut of Internal Auditor (IIA) dalam Sudaryati (2009), menyebutkan bahwa kecurangan meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Fraud menurut ACFE dalam Rukmawati (2011), adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Purjono (2012) mendefinisikan fraud sebagai suatu kecurangan, baik dalam bentuk penggelapan atau penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Miqdad (2008) dalam Purjono (2012) mengkategorikan tindakan fraud menjadi tiga kelompok, antara lain korupsi, penggunaan aset yang tidak selayaknya (*asset misappropriation*), dan fraud atas laporan keuangan. Kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan digambarkan dalam segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yang terdiri dari insentif / tekanan, kesempatan, dan sikap (Arens *et all*, 2011: 375).

Menurut Ajeng Wind (2014:3) kecurangan dapat dibagi menjadi empat hal yang mendasar yaitu: “(1) Sebuah kesalahan yang bersifat material, (2) Scierter, adalah maksud untuk melakukan penipuan, manipulasi atau melakukan kecurangan, (3) Reliance, adalah seseorang menerima representasi cukup dan dapat dibenarkan dari representasi tersebut, (4) Kerusakan, adalah kerusakan keuangan yang diakibatkan dari ketiga hal diatas.”

Karyono (2013:4) mengemukakan fraud sebagai berikut: “Fraud dapat juga diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya, menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik

pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendeteksian kecurangan adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar dan cara mendeteksi sebuah kesalahan yang bersifat material yang mengandung makna suatu penyimpangan dengan menunjukkan ketepatan dan kebenaran untuk menemukan penyimpangan dan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan tujuan tertentu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

#### **2.2.10.2 Unsur-Unsur Pendeteksian Fraud (Kecurangan)**

Menurut Zimbelman (2010:7) terdapat unsur-unsur kecurangan sebagai berikut:

1. Sebuah penyajian
2. Mengenai hal yang material
3. Yang salah,
4. Dan secara sengaja atau,
5. Yang dipercaya,
6. Dan dilaksanakan korban
7. Dan merugikan korban.

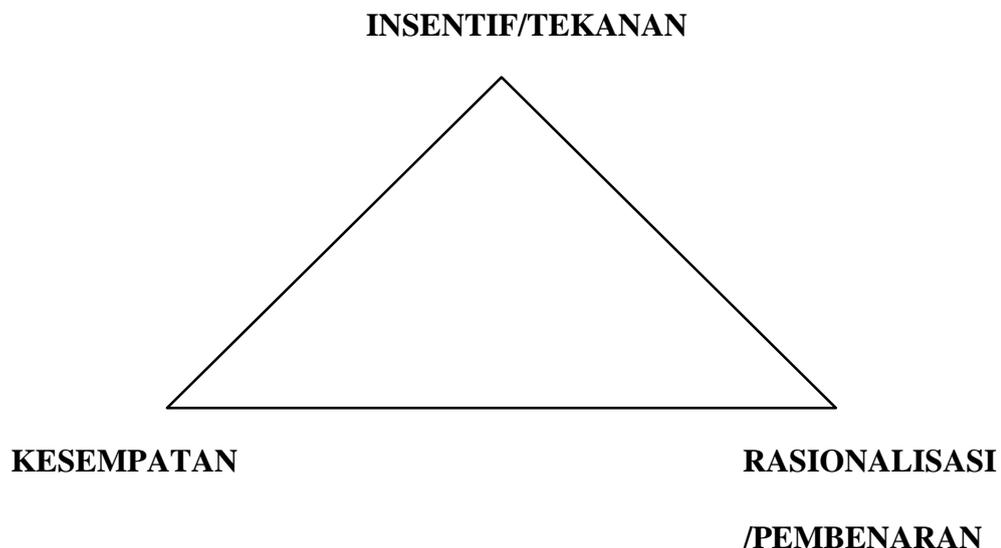
Menurut Karyono (2013:5) kecurangan memiliki beberapa unsur diantaranya:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
2. Dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi
3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok.
4. Langsung atau tidak langsung merugikan orang lain.

### 2.2.10.3 Faktor Pendorong Pendeteksian Fraud (Kecurangan)

Teori Segitiga Fraud yang dicetuskan pertama kali oleh DR. Donald Cressy salah seorang pendiri ACFE yang dikutip oleh pengarang Auditing antara lain Steve Alberecht dalam bukunya *Fraud Examination* dan Alvin. Arens CS dalam *Auditing and Assurance Service* yang dikutip oleh Karyono dalam *Forensic Auditing* (2013:8). Dalam teori segitiga, perilaku fraud didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga unsur itu digambarkan dalam segitiga sama sisi karena bobot atau derajat ketiga unsur itu sama, sebagaimana tergambar sebagai berikut ini:

Gambar 2. 2 Segitiga Kecurangan



#### 1. Tekanan

Pendorong untuk melakukan fraud terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena:

- a. Tekanan keuangan; antara lain berupa banyak hutang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan (besar pasak daripada tiang), keserakahan dan kebutuhan yang tidak terduga.
- b. Kebiasaan buruk; antara lain kecanduan narkoba, judi, dan peminum minuman keras.
- c. Tekanan lingkungan kerja; seperti kurang dihargai prestasi atau kinerja, gaji rendah dan tidak puas dengan pekerjaan.

d. Tekanan lain; seperti tekanan dari istri/suami untuk memiliki barang-barang mewah.

## 2. Kesempatan

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Disamping itu tercipta beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindak kriminal. Menurut Steve Albrecht dalam Karyono, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan *fraud* yaitu:

- a. Kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan.
- b. Terbatasnya akses terhadap informasi.
- c. Ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan pegawai.
- d. Kurangnya jejak audit.

## 3. Pembeneran

Pelaku kecurangan mencaari pembeneran antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa atau wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

### **2.2.10.4 Klarifikasi Fraud (Kecurangan)**

Menurut Karyono (2013:11) klasifikasi kecurangan dapat ditinjau dari sudut atau sisi sebagai berikut:

1. Kecurangan Ditinjau dari Sisi Korban Kecurangan dari sisi korban dibedakan menjadi kecurangan yang mengakibatkan entitas organisasi dan kecurangan yang ditunjukkan untuk kepentingan entitas atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
  - a. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi entitas organisasi. Kecurangan ini dapat dilakukan oleh pihak intern dan pihak ekstern

organisasi dan merugikan bagi organisasi. Adapun kecurangan yang dilakukan oleh pihak intern dan ekstern organisasi. Antara lain:

1. Meningkatkan upah melalui penambahan karyawan fiktif.
  2. Kecurangan pengadaan barang dengan *mark up* atau menggelembungkan harga.
  3. Manipulasi dengan pengadaan barang atau jasa fiktif.
  4. Kecurangan oleh pemasok, kontraktor melalui pengiriman. Barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan penagihan ganda.
  5. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Bentuk kecurangannya antara lain:
    - a. Merendahkan biaya atau kerugian.
    - b. Meninggikan penjualan atau keuntungan.
    - c. Meninggikan persediaan akhir.
    - d. Merendahkan hutang para pemegang saham atau para kreditur.
    - e. Merugikan pemerintah dari penerimaan pajak.
    - f. Meninggikan biaya dengan maksud mengelabui pihak fiskus dengan merendahkan laba kena pajak.
    - g. Merugikan pemegang saham atau kreditur.
    - h. Menipu pelanggan dengan menggunakan alat seperti timbangan pengukuran yang direndahkan.
    - i. Merugikan pemberi kerja.
    - j. Merendahkan penggunaan material pembangunan dalam jumlah dan kualitas.
    - k. Meninggikan biaya dalam kontrak kerja.
2. Kecurangan *Fraud* Ditinjau dari Sisi Akibat Hukum yang Ditimbulkan. Perbuatan curang merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan menurut akibat hukum yang ditimbulkan yaitu: kasus pidana umum, kasus pidana khusus, dan kasus perdata. Kasus perdata karena ada pelanggaran perikatan dan adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, di pemerintahan akibat hukum perbuatan curang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan pembendaharaan.

3. Kecurangan Ditinjau dari Sisi Pelaku Kecurangan. Kecurangan dapat pula diklasifikasikan menurut perilaku kecurangannya yaitu kecurangan dari dalam organisasi (*internal*) dari luar organisasi (*eksternal*), dan melibatkan orang dalam dan orang luar organisasi (kolusi). Kecurangan oleh pelaku intern organisasi terdiri atas kecurangan manajemen dan kecurangan karyawan.
  - a. Kecurangan Manajemen Kecurangan manajemen antara lain berupa kesalahan penyajian mengenai tingkat kinerja perusahaan atau unit organisasi yang sengaja dilakukan oleh karyawan dalam peran manajerialnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut.
  - b. Kecurangan Karyawan *Non-management fraud* merupakan tindakan-tindakan tidak jujur didalam suatu perusahaan atau organisasi yang dilakukan oleh karyawan walaupun manajemen telah menciptakan langkah-langkah dan usaha-usaha tertentu untuk mencegahnya. Kecurangan karyawan ini biasanya melibatkan perpindahan aktiva atau asset dari pemberi kerja, dan merupakan tindakan langsung dari pencurian atau manipulasi. Contohnya antara lain menaikkan pembayaran perusahaan untuk menutupi item yang digunakan pribadi karyawan, produknya disimpan atau dijual untuk kepentingan pribadi.
  - c. Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi Kecurangan dari pihak luar organisasi antara lain dilakukan oleh pemasok dan oleh kontraktor, dengan cara:
    1. Pengiriman barang yang lebih sedikit, dan penggantian barang dengan kualitas rendah.
    2. Penyerahan pekerjaan dengan kualitas rendah.
    3. Penagihan ganda atau penagihan lebih besar dari prestasi yang diberikan.
  - d. Kecurangan yang melibatkan orang dalam dan orang luar organisasi kecurangan ini dilakukan melalui kerjasama yang tidak sehat (kolusi) atau persekongkolan antara orang dalam dan orang luar organisasi, seperti:
    1. Pimpinan instansi/ proyek pemerintah bersama kontraktor sepakat untuk menandatangani berita acara serah terima pekerjaan yang akan dijadikan

dasar pembayaran lunas terhadap pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai.

2. Pemberian kredit oleh bank-bank kepada debitur tertentu tanpa jaminan yang memadai, yang sengaja dilakukan sehingga sudah dapat dipastikan akan menjadi kredit macet dikemudian hari.

#### **2.2.10.5 Bentuk-Bentuk Fraud (Kecurangan)**

Menurut Johnstone *et al.*, (2014:34-35) bahwa Kecurangan sebagai berikut:

1. Salah Saji Timbul Dari Penyalagunaan Aset Penyalahgunaan aset terjadi ketika pelaku mencuri atau menyalahgunakan suatu aset organisasi. Penyelewengan aset adalah skemapenipuan yang dominan dilakukan terhadap usaha kecil dan para pelaku biasanya karyawan. Penyalahgunaan aset terjadi ketika karyawan:
  - a. Mendapatkan akses ke uang tunai dan memanipulasi untuk menutupi pencurian kas.
  - b. Memanipulasi pengeluaran kas melalui perusahaan palsu.
  - c. Mencuri persediaan atau aset lain dan memanipulasi catatan keuangan untuk menutupi penipuan.
2. Salah Saji Transaksi Penipuan Pelaporan Keuangan Manipulasi secara sengaja terhadap hasil keuangan dengan mengutarakan kondisi ekonomi organisasi yang salah pada pelaporan keuangan. Tiga cara umum kondisi penipuan laporan keuangan dapat terjadi antara lain:
  - a. Manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi atau mendukung dokumen.
  - b. Keliru atau kelalaian dari peristiwa, transaksi, atau orang penting lainnya informasi.
  - c. Penyalahgunaan disengaja prinsip akuntansi.

Menurut Karyono (2013:17) kecurangan terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan Kecurangan laporan keuangan (*fraudlent financial statement*) dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*over statement*) dan lebih buruk dari sebenarnya (*under statement*). Laporan keuangan *over stated* dilakukan dengan melaporkan asset dan pendapatan lebih besar dari yang sebenarnya. Kecurangan ini bertujuan:

- a. Meninggikan nilai kekayaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan saham, karena nilainya naik.
  - b. Untuk mendapatkan sumber pembiayaan atau memperoleh persyaratan yang lebih menguntungkan, dalam kaitannya untuk kredit perbankan atau kredit lembaga keuangan lainnya.
  - c. Untuk menggambarkan rentabilitas atau perolehan laba yang lebih baik.
  - d. Untuk menutupi ketidakmampuan dalam menghasilkan uang/kas.
2. Penyimpangan Atas Aset (*asset misappropriation*)
- Penyimpangan atas aset dapat digolongkan ke dalam “Kecurangan Kas” dan “Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya”, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*Fraudulent disbursement*).
3. Korupsi Kata korupsi (*corruption*) berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Pengertian korupsi bervariasi, namun secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi terjadi pada organisasi korporasi swasta dan pada sektor publik/pemerintah. Adapun bentuk korupsi tersebut terdiri atas hal-hal berikut ini.
- a. Pertentangan Kepentingan  
Bentuk korupsi ini terjadi ketika karyawan atau manajer mempunyai kepentingan pribadi pada suatu kegiatan atau transaksi bisnis pada organisasi dimana ia bekerja, kepentingan tersebut berlawanan dengan kepentingan organisasinya.
  - b. Suap  
Suap adalah pemberian, permohonan atau penerimaan atas sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan seseorang karena pekerjaannya. Sesuatu yang bernilai tersebut dapat berupa uang, pelunasan hutang, hiburan, fasilitas, keuntungan bisnis, janji-janji manis, pinjaman, dan sebagainya.

c. Pemberian tidak sah

Pemberian tidak sah adalah pemberian sesuatu yang bernilai kepada seseorang karena keputusan yang diambil oleh seseorang. Keputusan itu berdampak memberi keuntungan kepada pemberi sesuatu yang bernilai tersebut.

d. Pemerasan Ekonomi Pada bentuk korupsi ini, karyawan minta bayaran dari rekanan (vendor) atas keputusan yang diambil yang menguntungkan rekanan (vendor) tersebut. Caranya dengan jalan menakut-nakuti, dengan ancaman atau bujukan.

4. Kecurangan yang Berkaitan dengan Komputer

Kecurangan yang berkaitan dengan komputer (*computer fraud*) menurut Stanford Research International yang diungkap oleh G. Jack Balogna dalam bukunya *Forensic Accounting* diungkap mulai tahun 1958 kejahatan waktu itu dikelompokkan dalam:

- a. Perusakan komputer.
- b. Pencarian informasi dan harta kekayaan.
- c. Kecurangan keuangan atau pencurian kas.
- d. Penggunaan atau penjualan jasa komputer secara tidak sah.

#### 2.2.10.6 Ciri-Ciri Fraud (Kecurangan)

Ciri-ciri kecurangan (*fraud*) yang tercermin melalui karakteristik tertentu yang berifat kondisi atau situasi tertentu yang merupakan peringatan dini terjadinya fraud. Menurut W. Steve Albrecht dalam bukunya *Fraud Examination* yang dikutip oleh Karyono (2013:95) ada enam jenis tanda-tanda *fraud* yaitu sebagai berikut:

1. Keganjilan Akuntansi Keganjilan akuntansi (*accounting anomalies*) atau penyimpangan akuntansi karena adanya rekayasa dari pelaku, sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat terdeteksi dari akuntansinya.
2. Kelemahan Pengendalian Intern Pengendalian internal antara lain dirancang untuk dapat mengamankan harta milik organisasi. Bila pengendalian intern tidak dapat berfungsi efektif sebagai sarana kendali, kemungkinan besar terjadi *fraud*.

3. Penyimpangan Analisis Memahami tanda-tanda *fraud* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai analisis berupa:
  - a. Analisis vertikal adalah analisis hubungan antar item-item dalam laporan keuangan (laporan posisi keuangan, laporan rugi laba dan laporan arus kas) tahun lalu dengan tahun ini yang digambarkan dalam presentase.
  - b. Analisis horizontal adalah analisis presentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan.
  - c. Analisis rasio adalah perbandingan item-item dalam laporan keuangan seperti rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio lancar (*current ratio*).
  - d. Analisis rendemen adalah perbandingan antara hasil barang jadi dengan bahan bakunya.
4. Gaya Hidup Berlebihan Tekanan ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya niat melakukan tindakan *fraud*. Setelah *fraud* berhasil, gaya hidup pelaku berubah menjadi berlebihan (*extravagant lifestyle*). Hal ini terlihat dari hasil penelitian tertutup (secara diam-diam) diperoleh kenyataan bahwa pelaku ternyata:
  - a. Hidupnya sangat boros.
  - b. Hidupnya konsumtif, suka membeli barang mewah dan monil mewah padahal penghasilan resminya tidak memungkinkan untuk belanja seperti itu. Oleh karena itu, gaya hidup berlebihan merupakan tanda adanya *fraud* yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti.
5. Kelakuan Tidak Biasa  
Kelakuan tidak biasa (*unusual behaviour*) atau perilaku menyimpang sebagai akibat rasa bersalah dan adanya rasatakut, sehingga kelakuan tidak biasa ini merupakan gejala terjadinya *fraud*.
6. Pengaduan  
Pengaduan (*tip or complain*) atau adanya keluhan atas kegiatan atau pelayanan oleh organisasi atau pegawai hanya dianggap sebagai gejala karena pengaduan tersebut belum tentu benar. Pihak ketiga yang mengadu mungkin untuk memperoleh kepentingan individu semata, sedangkan karyawan yang mengadu karena iri hati atau masalah pribadi lain.

### 2.2.10.7 Upaya Auditor dalam Mendeteksi Fraud (Kecurangan)

Pada dasarnya tindak kecurangan dapat dibongkar oleh audit karena adanya indikasi awal serta perencanaan yang baik untuk menyingkap segala sesuatu mengenai tindak kecurangan yang mungkin terjadi, tim audit harus memiliki intuisi yang tajam melihat berbagai aspek internal perusahaan yang rawan terjadi kecurangan.

Kumaat (2011:156) menyatakan bahwa :

“Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit)”.

Sedangkan menurut (Fitriany,2012:7) Upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah:

“Kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (*fraud*) tersebut”

Audit akan dapat berjalan secara efektif jika mampu dalam mendeteksi kecurangan dan mengurangi kegagalan dalam pendeteksian kecurangan melalui tindakan dan langkah-langkah sebagai berikut (SAS No. 99):

1. Seluruh anggota tim harus memahami apa yang disebut dengan kecurangan dan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kecurangan.
2. Mendiskusikan di antara anggota tim mengenai risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan.
3. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan.
4. Mengidentifikasi masing-masing risiko yang mungkin menyebabkan salah saji material yang berasal dari tindakan kecurangan.
5. Menilai risiko-risiko yang teridentifikasi serta mengevaluasi pengaruhnya pada akun.

6. Merespon hasil penilaian mengenai risiko kecurangan. Respon yang harus diberikan oleh auditor adalah:
  - a. Respon bahwa risiko keuangan memiliki efek pada bagaimana audit akan dilaksanakan .
  - b. Respon yang meliputi penentuan sifat, saat dan lingkup prosedur audit yang akan dilaksanakan.
  - c. Respon dengan merencanakan prosedur-prosedur tertentu dengan tujuan mendeteksi salah saji material akibat tindakan kecurangan.
7. Mengevaluasi hasil audit. Audit harus mengevaluasi:
  - d. Penilaian risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan selama pelaksanaan audit
  - e. Mengevaluasi prosedur analitis yang dilaksanakan dalam pengujian substantive atau review keseluruhan tahap audit yang mengidentifikasi tidak ditemukan risiko salah saji material yang berasal dari tindakan kecurangan.
  - f. Mengevaluasi risiko salah saji material yang disebabkan kecurangan saat audit hampir selesai dilaksanakan.
8. Mengkomunikasikan mengenai kecurangan pada manajemen, komite audit atau pihak lain.
9. Mendokumentasikan pertimbangan yang digunakan oleh auditor mengenai kecurangan. Dokumentasi itu dalam bentuk:
  - a. Dokumentasi mengenai diskusi antar anggota tim audit dalam perencanaan audit dalam hubungannya dengan pendeteksian kecurangan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan entitas.
  - b. Prosedur yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menilai salah saji yang disebabkan oleh tindakan kecurangan .
  - c. Risiko khusus yang teridentifikasi dan menilai salah saji material dan respon auditor atas hal tersebut.
  - d. Alasan untuk tidak dilaksanakannya prosedur tambahan tertentu.
  - e. Bentuk komunikasi mengenai kecurangan pada manajemen, komite audit atau pihak lain.

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, maka auditor diharapkan dapat lebih efektif dalam melaksanakan pengauditan yang sekaligus dapat lebih efektif dalam mendeteksi adanya kecurangan di dalam laporan keuangan serta menghindari tuntutan hukum dikemudian hari.

#### **2.2.10.8 Elemen – Elemen Penting yang Membantu Auditor dalam Mendeteksi Fraud (Kecurangan)**

Menurut Karyono (2013: 92-94) langkah awal mendeteksi kecurangan ialah: memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha. Salah satu elemen paling penting dalam mendeteksi kecurangan adalah kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi secara cepat potensi dan penyebab terjadinya kecurangan. Berikut adalah upaya auditor untuk dapat mampu mendeteksi kecurangan:

1. Pengujian pendalian intern
2. Dengan audit keuangan atau audit operasional
3. Pengumpulan data intelejen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi
4. Penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur
5. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi
6. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan, dan intuisi atasan.

Yang dimaksud dari poin – poin diatas tentang upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah :

- a. Pengujian pengendalian intern  
Meliputi pengujian pelaksanaan secara acak dan mendadak. Hal ini untuk mendeteksi fraud yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian intern yang ada tidak berfungsi efektif.
- b. Dengan audit keuangan atau audit operasional  
Seorang auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga *fraud* dapat terdeteksi.
- c. Pengumpulan data intelejen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi. Dijelaskan bahwa pendeteksian ini dilakukan secara

tertutup atau diam-diam mencari informasi tentang orang yang sedang dicurigai.

- d. Penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur  
Dimaksud antara lain:
  - 1. Adanya pengendalian intern yang tidak dilaksanakan;
  - 2. Transaksi-transaksi yang janggal seperti waktu transaksi hari minggu atau hari libur;
  - 3. Tingkat motivasi, moral dan kepuasan kerja terus menerus menurun;
  - 4. Sistem pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis.
- e. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi.
- f. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan, dan intuisi atasan.

### **2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian**

- 1. Pengalaman Audit berpengaruh terhadap Pendeteksian *Fraud* (Kecurangan), hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pengalaman audit terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan telah dilakukan sebelumnya oleh Nasution dan Firtiyani (2012) dan Adyani (2014), menunjukkan bahwa pengalaman audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Namun, ditemukan hasil yang bertolak belakang dengan dua penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Supriyono (2014) menemukan hal yang berbeda, bahwa pengalaman seorang auditor tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena pendeteksian kecurangan bergantung pula pada kecanggihan pelaku kecurangan, frekuensi dari manipulasi, tingkat kolusi, dan ukuran senioritas yang dilibatkan. Dan penelitian menurut Fakhri Hilmi (2010) bahwa hasil penelitian menunjukkan pengalaman audit berpengaruh terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan dengan tingkat signifikansi 0,000.
- 2. Skeptisme Profesional berpengaruh terhadap Pendeteksian *Fraud* (Kecurangan), penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Aulia (2013) dan Adnyani (2014) menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Eko Ferry Anggriawan (2014) Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisisme Profesional Auditor dan Tekanan Waktu terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam efektivitas pendeteksian kecurangan. Nyoman Adyani, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Trisna Herawati (2014). Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel skeptisisme profesional auditor memiliki pengaruh paling dominan terhadap tanggung jawab auditor dalam efektivitas mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan dibuktikan dengan koefisien regresi yang paling besar yaitu 0,125. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Fakhri Hilmi (2010), hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

3. Kompetensi berpengaruh terhadap Pendeteksian Fraud (Kecurangan), Penelitian ini didukung dalam Ramadhany (2015) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini juga didukung oleh Fuad (2015) bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu sejalan dengan Srikandi (2015) bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.
4. Etika Profesi berpengaruh terhadap Pendeteksian Fraud (Kecurangan), penelitian sebelumnya mengenai Analisis Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Pengalaman Bekerja Auditor, dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik, Minanda dan Muid (2013) menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas Akuntan Publik. Penelitian ini didukung dalam Kadhafi, et al., (2014) kualitas audit sangat dipengaruhi oleh etika auditor. Standar audit secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh pengalaman terhadap Pendeteksian Fraud (Kecurangan)**

Perkembangan moral kognitif seseorang diantaranya sangat dipengaruhi oleh pengalaman (Nasution, 2012). Pengalaman auditor akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman audit, adanya diskusi mengenai audit dengan rekan sekerja, adanya program pelatihan dan penggunaan standar.

Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, maka akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan termasuk dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. Semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan dari berbagai jenis industri (Minanda dan Muid, 2013).

Penelitian Noviyani (2002) yang didukung oleh penelitian Tirta dan Sholihin (2004) dan Nasution (2012) menemukan auditor yang berpengalaman akan memiliki pengetahuan tentang kekeliruan dan kecurangan yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi kasus-kasus kecurangan dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diduga terdapat pengaruh positif antara pengalaman dengan kemampuan mendeteksi kecurangan, yaitu semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin meningkat kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Sehingga diperoleh hipotesis:

*H1: Pengalaman Audit berpengaruh terhadap Pendeteksian Fraud (Kecurangan).*

### **2.4.2 Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Fraud (Kecurangan)**

Sikap skeptisisme profesional auditor adalah sikap kritis yang selalu mempertanyakan keandalan bukti audit atau informasi yang diperoleh dari pihak klien. Dalam menjalankan sikap skeptisisme profesionalnya seorang auditor

cenderung tidak mempercayai atau menyetujui manajemen tanpa bukti yang menguatkan (Louwers, 2011 dalam Djohar, 2012). Skeptisisme profesional sangat dibutuhkan dalam proses audit karena dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi audit, jika skeptisisme terlalu rendah maka akan memperburuk efektivitas audit (*Financial Reporting Council*, 2010 dalam Djohar 2012). Semakin tinggi skeptisisme profesional auditor maka auditor akan semakin banyak mendapatkan informasi mengenai kecurigaanya sehingga dapat mengungkapkan kecurangan yang terjadi, hal ini dapat meningkatkan kinerja auditor dalam mendeteksi kecurangan, termasuk dalam meningkatkan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2013) tentang pengaruh pengalaman, independensi dan skeptisme profesional auditor dalam pendeteksian kecurangan, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendekteksian kecurangan. Hal ini juga didukung Ramadhany (2015) bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini juga didukung Adnyani et al., (2015) bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan. Maka pada penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

*H3: Skeptisme Profesional berpengaruh terhadap Pendeteksian Fraud (Kecurangan).*

#### **2.4.3 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pendeteksian Fraud (Kecurangan)**

Menurut Mulyadi (2012) kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan.

Penelitian ini didukung dalam Ramadhany (2015) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini juga didukung oleh Fuad (2015) bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu sejalan dengan Srikandi (2015) bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dibangun adalah:

*H5 : Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pendeteksian Fraud (Kecurangan).*

#### **2.4.4 Pengaruh Kepatuhan Etika Profesi terhadap Pendeteksian Kecurangan**

Menurut Choyroh dalam Ahmad Amin (2012) “Etika profesi akuntan berpengaruh kuat terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan. Karena dengan dimilikinya etika yang baik dapat meningkatkan kualitas auditor dalam menyajikan laporan keuangan yang transparansi, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan”.

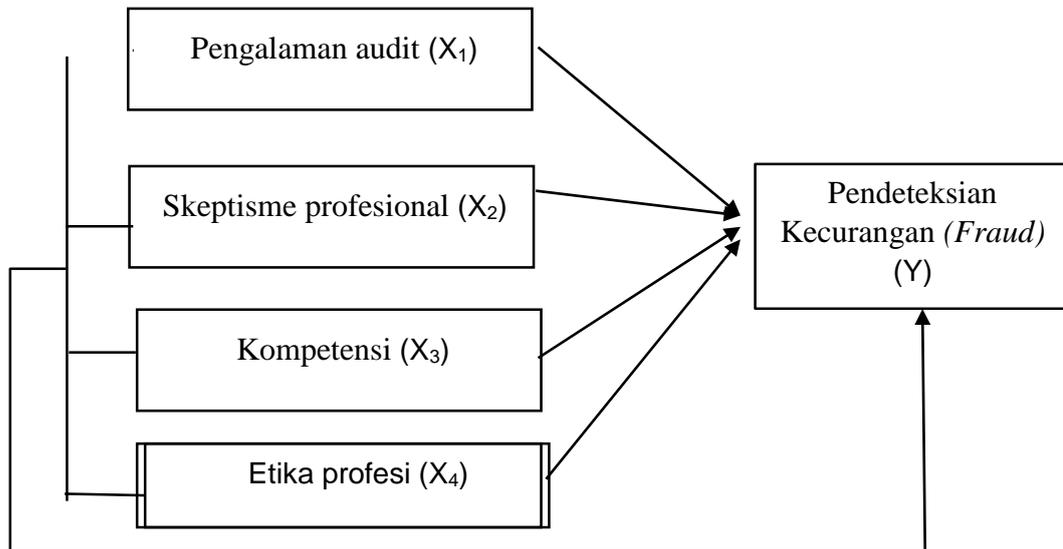
Hasil penelitian yang dilakukan Putri dan Laksito (2013) menunjukkan bahwa lingkungan etika memiliki pengaruh positif terhadap *auditjudgment*. Terbentuknya lingkungan etika yang tinggi pada organisasi KAP, membuat auditor cenderung memiliki *auditjudgment* yang lebih baik. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat dibuat hipotesis bahwa:

*H6 : Pengaruh Kepatuhan Etika Profesi terhadap Pendeteksian Fraud (Kecurangan).*

#### **2.5 Kerangka Konseptual Penelitian**

Dalam penelitian ini variabel pengalaman audit merupakan yang sangat penting dalam proses pendeteksian kecurangan, hal ini dikarenakan seorang auditor yang dianggap memiliki pengalaman yang lebih banyak akan mampu dalam mengungkap kecurangan. Sedangkan seorang auditor juga harus dapat mengemukakan risiko audit yang mungkin timbul dalam proses pendeteksian kecurangan. Selain itu sikap skeptisme profesional seorang auditor sangat diperlukan guna mempermudah seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan,

dikarenakan sikap skeptisme profesional akan digunakan untuk mendapatkan informasi yang kuat, yang akan dijadikan dasar bukti audit yang relevan yang dapat mendukung opini atas kewajaran laporan keuangan. Berikut merupakan gambar kerangka berfikir penelitian ini :



Gambar 2. 3 Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisme Profesional, Kompetensi, dan Etika Profesi Terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

